

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
DALAM *SUSTAINABILITY REPORT*
(Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam
Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

RICHA PUSPITA ALFIA
NIM. C2C009258

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Richa Puspita Alfia

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009258

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DALAM *SUSTAINABILITY*
REPORT (Studi pada Perusahaan yang
Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Periode
2009-2011)**

Dosen Pembimbing : Prof. Drs. H. Arifin S, M.Com, Hons, Ph.D, Akt.

Semarang, 31 Mei 2013

Dosen Pembimbing

(Prof. Drs. H. Arifin S, M.Com, Hons, Ph.D, Akt)

NIP. 19600909 198703 1023

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Richa Puspita Alfia

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009258

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM *SUSTAINABILITY REPORT* (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 Juni 2013

Tim Penguji

1. Prof. Drs. H. Arifin S, M.Com, Hons, Ph.D, Akt(.....)
2. Dr. Darsono., M.B.A., Akt (.....)
3. Dr. H. Sugeng Pamudji, M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Richa Puspita Alfia, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM *SUSTAINABILITY REPORT*** (Studi pada **Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011**) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 31 Mei 2013
Yang membuat pernyataan

(Richa Puspita Alfia)
NIM. C2C009258

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of corporate governance structures consisting of: Board of Commissioner Independence, Audit Committee Independence, Managerial Ownership, Foreign Ownership, and Public Ownership on the Corporate Social Responsibility Disclosure.

The population of this research are listed companies in Indonesian Stock Exchange (IDX). The selection of this sample using purposive sampling method, that are companies which publishing sustainability report and annual report during 2009 through 2011. Multiple regression analysis was conducted using SPSS version 16.00 for windows.

Result of this research indicates that managerial ownership and public ownership, significant effect on corporate social disclosure in sustainability report. While other variables do not have significant effect on corporate social responsibility disclosure in sustainability report.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Structure of Corporate Governance, Board of Commissioner, Audit Committee, Ownership Structure, Sustainability Report

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Struktur *Corporate Governance* yang terdiri dari: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, dan Kepemilikan Publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang merupakan perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* dan laporan tahunan selama tahun 2009 hingga tahun 2011. Analisis dilakukan dengan regresi berganda menggunakan program SPSS versi 16.00 untuk *windows*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam *sustainability report*. Sedangkan variabel lain tidak memiliki signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam *sustainability report*.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility, Struktur Corporate Governance, Dewan Komisaris, Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Sustainability Report*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbilalamin, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga akhirnya penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam *Sustainability Report* (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011)”** ini dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Program Strata (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan sebuah itikad dan semangat untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian ilmu pengetahuan, khususnya Akuntansi. Penulis menyadari bahwa karya ini hanya sebagian kecil dari ribuan karya yang lain, namun penulis berharap agar karya ini tetap memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, arahan dan doa dari berbagai pihak yang turut terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dan merupakan sumber kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Arifin, M. Com., (Hons), Ph.D, Akt selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan, koreksi, arahan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Drs. Sudarno M.Si., Akt., Ph. D. Selaku dosen wali yang telah menjadi orang tua penulis selama di kampus.
6. Semua pendidik dan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi penulis.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
8. Orang tuaku tercinta, Mama Lis dan Papa Toni yang tak henti-hentinya memberikan doa, arahan, perhatian, serta dukungan baik moril maupun materiil selama ini.
9. Saudaraku tersayang Mas Angga, Dek Rydha dan Kak Icha yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat.

10. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doanya.
11. Hafid yang selalu memberikan perhatian, mendoakan, menjadi pendengar yang baik, senantiasa membantu dan mendukung, bahkan tidak segan menasehati demi kebaikanku.
12. Sahabat-sahabatku seperjuangan dikampus, Virda, Hanni, Nita, Ajeng, Bella, dan Fenny yang tiada henti memberikan semangat, terus berjuang teman, semoga apa yang kita impikan masing-masing dapat tercapai.
13. Teman seperjuangan SR-ku Mega yang tak hentinya saling berbagi pengetahuan mengenai SR dan temen dari manajemen Putri yang selalu memberikan masukan-masukannya. Serta Hemi yang senantiasa memberi bantuan dan semangat hingga terselaikannya tugas akhir ini.
14. Teman satu bimbingan, Okta. Terima kasih sudah berbagi semangat dan dukungannya.
15. Teman-teman Akuntansi Reguler 2009 yang dengan telah memberikan kebersamaan selama 4 tahun ini, sukses selalu buat kita semua.
16. Keluarga Tembalang Selatan VII No 12: Nindi, Ririn, Dita, Mbak Rissa, Ajeng, Kiki, serta Bapak dan Ibu Arfah yang senantiasa memberikan semangat hingga terselesaikan tugas akhir ini.
17. Teman-teman Ikasada Semarang, yang sudah menjadi saudara senasib seperjuangan merantau, semoga cita-cita masing-masing dapat tercapai.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalam'ualaikum *Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 31 Mei 2013

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Inna ma’al ‘usri yusroo.”

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

-Q.S. Al-Insyirah: 6-

“inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin hattayughayyiruu maa bi-anfusihim”

“...Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu

kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri

mereka sendiri...”

-Q.S. Ar Ra’d: 11-

“Successful people have learned to make themselves do the thing that has to be done when it has to be done, whether they like it or not.”

-Aldous Huxley-

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Mama, Papa, Mas, dan Adek,

serta orang-orang yang aku sayangi,

atas segalanya,

sehingga diri ini mampu mengetik ucapan persembahan ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	12
2.1.1 Teori Agensi	12
2.1.2 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	14
2.1.2.1 Definisi <i>Corporate Social Responsibility</i>	14
2.1.2.2 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	16
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	20
2.1.3.1 Definisi <i>Corporate Governance</i>	20
2.1.3.2 Struktur <i>Corporate Governance</i>	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Posisi Penelitian	32

2.4	Kerangka Pemikiran	34
2.5	Pengembangan Hipotesis	35
2.5.1	Indepedensi Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan CSR	35
2.5.2	Indepedensi Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan CSR	36
2.5.3	Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Luas Pengungkapan CSR.....	38
2.5.4	Hubungan Kepemilikan Asing terhadap Luas Pengungkapan CSR	38
2.5.5	Hubungan Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan CSR	39
BAB III	METODE PENELITIAN	41
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
3.1.1	Variabel Dependen	41
3.1.2	Variabel Independen	42
3.1.3	Variabel Kontrol	44
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	46
3.3	Jenis dan Sumber Data	47
3.4	Metode Pengumpulan Data	48
3.5	Metode Analisis	48
3.5.1	Statistik Deskriptif	48
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	49
3.5.2.1	Uji Normalitas	49
3.5.2.2	Uji Multikolinieritas	50
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas	51
3.5.2.4	Uji Autokorelasi	52
3.5.3	Analisis Regresi Berganda	53
3.5.4	Analisis Hipotesis	54
3.5.4.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)	54
3.5.4.2	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	55
3.5.4.3	Koefisien (R^2)	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	57
4.2 Statistik Deskriptif	58
4.3 Uji Asumsi Klasik	63
4.3.1 Uji Normalitas	63
4.3.2 Uji Multikolinieritas	65
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	67
4.3.4 Uji Autokorelasi	70
4.4 Analisis Data	71
4.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji f)	71
4.4.2 Uji Parsial (Uji t)	73
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi	78
4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik	79
BAB V PENUTUP	86
5.1 Simpulan	86
5.2 Keterbatasan Penelitian	88
5.3 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel Kriteria	57
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	58
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi	62
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Normalitas (<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>)	65
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Multikolonieritas	66
Tabel 4.6 Hasil Pengujian <i>Glejser</i>	69
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Autokorelasi Uji <i>Durbin-Watson</i>	70
Tabel 4.8 Hasil Pengujian <i>Runs Test</i>	71
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Simultan (Uji F)	72
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Parsial (Uji t)	73
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	78
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Determinasi (R^2)	78

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

	Halaman
Gambar 2.4 Skema Kerangka Teoritis	35
Grafik 4.1 Histogram Normalitas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	64
Grafik 4.2 <i>Normal Probability Plot Corporate Social Responsibility</i>	64
Grafik 4.3 <i>Scatterplot Corporate Social Responsibility</i>	68

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Sampel Perusahaan	95
Lampiran 2 Tabel <i>Input</i> Data Penelitian	96
Lampiran 3 Hasil Olah Data dengan SPSS Versi 16	98
Lampiran 4 Daftar Indikator Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Menurut GRI	108
Lampiran 5 Hasil <i>Content Analysis</i> : Pengungkapan <i>Corporate Social</i> <i>Responsibility</i> dalam <i>Sustainability Report</i>	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan wacana yang sedang mengemuka di dunia perusahaan multinasional. CSR ini berawal dari banyaknya kritikan yang disampaikan oleh masyarakat, pemerintah, dan organisasi non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai dampak-dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan. Contoh kasus kerusakan lingkungan di Indonesia di antaranya melubernya lumpur dan gas panas di Kabupaten Sidoharjo yang disebabkan eksploitasi gas PT Lapindo Brantas, limbah industri PT Wings Surya yang melampaui baku mutu buangan limbah cair yang telah merusak sekitar 18 hektar tanaman padi milik warga, dan PT Adi Makayasa yang ditutup sementara karena warga sekitar mengeluhkan polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas pabrik pupuk organik tersebut (CSR Indonesia Newsletter: 2008).

Beberapa tahun terakhir banyak perusahaan semakin menyadari betapa penting penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan (Sudana: 2011). Penerapan tanggung jawab sosial juga semakin diperhatikan oleh kalangan dunia usaha dikarenakan masyarakat semakin kritis dan pintar dalam melakukan kontrol sosial dan lingkungan dari aktivitas yang ditimbulkan perusahaan.

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang pada awalnya merupakan kegiatan sukarela dan bukan paksaan. Kini berubah setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 yang menyebutkan bahwa CSR merupakan kewajiban bagi Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pengelolaan atau berkaitan dengan sumber daya alam, dianggarkan sebagai biaya Perseroan Terbatas dan bagi pelanggarannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki perhatian lebih terhadap CSR.

Di Indonesia, pada dasarnya pelaporan nonkeuangan seperti CSR ini secara umum telah terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan dalam *Exposure Draft* PSAK No. 20 tahun 2005 tentang Akuntansi Lingkungan.

Dalam PSAK No. 1 tahun 2004 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian Tanggung jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09 dinyatakan bahwa :

”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Dalam *Exposure Draft* PSAK No. 20 tahun 2005 tentang Akuntansi Lingkungan bagian Pendahuluan paragraf 01 dinyatakan bahwa :

”.....perusahaan-perusahaan pada masa kini diharapkan atau diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mengenai kebijakan dan sasaran-sasaran lingkungannya, program-program yang sedang dilakukan dan kos-kos yang terjadi karena mengejar tujuan-tujuan ini dan menyiapkan serta mengungkapkan risiko-risiko lingkungan. Dalam area akuntansi, inisiatif yang telah digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan data dan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dalam hal terdapatnya implikasi keuangan dari masalah-masalah lingkungan.”

Eipstein & Freedman (1994) dalam Anggraini (2006:4) menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Terbukti dengan adanya hasil *survey* global yang dilakukan *The Economits Intelligence Unit* menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan CSR sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan (Warta Ekonomi, 2006).

Pengungkapan tanggung jawab sosial di dalam laporan perusahaan kini tidak lagi dihadapkan pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang dicerminkan melalui aspek keuangan saja. Namun harus berpijak pada konsep *triple bottom line* yaitu *economic prosperity*, *enviromental quality* dan *social justice*. Berdasarkan konsep *triple bottom line* perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memerhatikan 3P yaitu *profit*, *people*, dan *planet* (Anggraini, 2006). Jadi perusahaan yang ingin berkelanjutan tidak hanya mengejar *profit*, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan menjaga lingkungan sekitarnya (*planet*).

Perusahaan biasanya menginformasikan kegiatan CSR mereka dalam laporan tahunan atau laporan sosial terpisah yang biasa dikenal dengan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). Namun, tidak ada standarisasi atau keseragaman dalam hal item yang dilaporkan, ataupun cara pelaporan. Akibatnya, berbagai LSM sudah mulai mengembangkan model atau kerangka kerja untuk melaporkan CSR, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *World Resorces Institude* (WRI), dan ISO 14001 (*International Organization for Standardization*) (Reverte: 2009). *Sustainability Report* di Indonesia telah banyak dipraktikkan dan

pelaporannya sudah banyak menggunakan pedoman dari *Global Reporting Initiative* (GRI).

Laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) kian menjadi tren dan kebutuhan bagi perusahaan progresif untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan (Chariri, 2009). Pengungkapan *sustainability reporting* dapat memungkinkan perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable performance*) dan mendapatkan legitimasi dari usaha perusahaan.

CSR memiliki kaitan erat dengan *good corporate governance*. Seperti dua sisi mata uang, keduanya memiliki kedudukan yang kuat dalam dunia bisnis namun berhubungan satu sama lain (Murwaningsari, 2009). CSR berorientasi kepada para *stakeholders*, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama *good corporate governance* yaitu *responsibility*, sedangkan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Corporate Governance sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan *stakeholders* telah dilindungi (Said *et, al.*, 2009). *Corporate governance* diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pemberi keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima keuntungan atas dana yang mereka investasikan pada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pengungkapan terhadap aspek-aspek kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan keberlanjutan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas terhadap para investor dan

stakeholders. Sehingga penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri, 2009).

Konsep GCG adalah konsep yang di dalamnya menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris, sehingga dapat terjalin hubungan atau mekanisme kerja, pembangunan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *stakeholder* (Mulia:76:2009).

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa aktivitas CSR tidak dapat terlepas dari penerapan *Good Corporate Governance*. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara *corporate governance* dengan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Khan *et, al.* (2012), yang meneliti mengenai pengaruh hubungan antara *corporate governance* dan pengungkapan *corporate sosial responsibility* pada perusahaan yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange (DSE) di Bangladesh. Karakteristik *corporate governance* yang diuji hubungannya dengan pengungkapan *corporate social responsibility* dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan asing, *board independence*, dualitas CEO, dan keberadaan komite audit. Hasil penelitian Khan, *et, al.* (2012) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing, *board independence*, dan keberadaan komite

audit yang paling berkorelasi positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Bangladesh.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian Khan *et, al.* (2012), antara lain adalah penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Ditetapkannya perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan sebagai sampel penelitian karena penelitian mengenai pengungkapan CSR dalam *sustainability report* masih sedikit di Indonesia. Variabel keberadaan komite audit digantikan dengan independensi komite audit dikarenakan varian variabel tidak bervariasi, dimana semua perusahaan yang menjadi sampel memiliki komite audit. Selain itu, penelitian tidak menggunakan variabel *board independence* melainkan menggunakan variabel independensi dewan komisaris, serta tidak memasukkan variabel dualitas CEO. Perbedaan ini dikarenakan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, dimana perusahaan-perusahaan di Indonesia menganut *Two Tier Board System*.

Penelitian ini juga berbeda dalam hal item pengungkapan, penelitian sebelumnya menggunakan item pengungkapan yang berdasarkan penelitian di masa lalu, terutama dari Haniffa dan Cooke (2005) dan Ghazali (2007) yang meliputi lima tema yaitu lingkungan, keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia/karyawan, dan energi. Sedangkan penelitian ini menggunakan item-item CSR yang mengacu pada standar pelaporan internasional “*Sustainability Reporting Guidelines*” versi 3.1 yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) yang berjumlah 84 item, dengan fokus pengungkapan berpijak pada aspek kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana *corporate governance* dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dalam *sustainability report* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Saat ini, *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kalangan dunia usaha. Terbukti beberapa dekade terakhir mulai banyak perusahaan yang melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban sosial. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas juga mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan. Namun seiring perkembangan CSR, informasi sosial dan lingkungan dapat disajikan dalam laporan terpisah dari laporan keuangan yang biasa disebut laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Kegiatan dan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak lain merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Corporate Governance*. Dengan adanya *Corporate Governance* maka ada suatu alat kontrol terhadap manajemen yang mengelola perusahaan dan sekaligus alat untuk menekan manajemen melakukan pertanggungjawaban sosial perusahaan sehingga kepentingan *stakeholders* dapat terlindungi.

Penelitian ini mengulas mengenai pengungkapan CSR di dalam *sustainability report* di Indonesia secara terpisah dari laporan tahunan. Penelitian

ini dilakukan karena di Indonesia masih sedikit penelitian yang meneliti pengungkapan CSR dalam laporan *sustainability report*. Selain itu, penelitian masih meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR karena terjadi ketidakkonsistenan hasil beberapa penelitian yang menguji dari variabel yang serupa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan apakah independensi dewan komisaris, independensi komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik sebagai struktur *Corporate Governance* berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan terpisah (*sustainability report*) pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak independensi dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Untuk mengetahui dampak independensi komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Untuk mengetahui dampak kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Untuk mengetahui dampak kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
5. Untuk mengetahui dampak kepemilikan publik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor *Corporate Governance* yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* di Indonesia serta lebih menambah wawasan dalam mengaplikasikan konsep *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan.
2. Dapat digunakan juga sebagai bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi dilihat dari segi penerapan *corporate governance* dan *corporate social responsibility* perusahaan.
3. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dan lembaga-lembaga regulator lainnya dalam meningkatkan kualitas standar peraturan yang sudah ada (*Global Reporting Initiative*).
4. Sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan memperbaiki keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, adapun urutan pembahasan dari masing-masing bab akan diuraikan di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pemandu uraian-uraian mengenai isu penelitian dan permasalahan yang timbul sehingga mendorong penelitian ini. Bab 1 ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori dan penelitian terdahulu berkaitan dengan topik/masalah yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian. Di dalam kerangka pemikiran tersebut dijelaskan juga mengenai variabel bebas dan variabel terikat dari penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diulas mengenai metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi

uji normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, multikolinieritas. Setelah semua uji terpenuhi, baru dilakukan uji hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain bertindak sebagai prinsipal (Hendriksen dan Van Breda, 2000 dalam Waryanto, 2009). Teori ini menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Yang dimaksud prinsipal adalah pemilik perusahaan, investor atau pemegang saham. Sedangkan agen di sini adalah manajemen perusahaan yang ditunjuk pemilik perusahaan atau pemegang saham dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk mengelola perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan dalam hubungan keagenan antara prinsipal dengan agen muncul konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini terjadi karena adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan perusahaan dan pengendalian. Sehingga keduanya memiliki tujuan yang berbeda, disatu sisi prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya atas penyertaan modal ke dalam perusahaan dengan melihat kenaikan proporsi dividen dari tiap tahun. Sedangkan agen akan meningkatkan

kesejahterannya sendiri dan mengabaikan kepentingan para prinsipal. Hal tersebut dilakukan agen karena pemisahan fungsi yang mengakibatkan semua risiko ditanggung oleh prinsipal dan agen hanya sebatas pengelola saja dalam perusahaan.

Konflik keagenan juga muncul karena pemegang saham tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja manajer perusahaan. Atau dengan kata lain dalam teori agensi ini juga terdapat masalah asimetri informasi (*information asymmetric*). Di mana manajer perusahaan lebih banyak memiliki informasi dibandingkan pemilik perusahaan atau pemegang saham itu sendiri, manajer perusahaan lebih tahu mengenai informasi internal perusahaan dan bahkan prospek keberlanjutan perusahaan yang akan datang. Manajer perusahaan sebagai pengelola tidak terlepas dari kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi dalam perusahaan. Informasi yang diungkapkan oleh para manajer tersebut digunakan pemilik perusahaan atau pemegang saham untuk dapat mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Namun, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kondisi ini dikenal dengan asimetri informasi (Hendriksen dan Van Breda, 2000 dalam Waryanto, 2009).

Masalah keagenan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat diatasi melalui pengungkapan. *Voluntary disclosure* dapat mengurangi asimetri, karena apabila terjadi asimetri informasi maka *agent* bisa mengambil keuntungan dari informasi yang lebih mudah diakses oleh mereka sendiri (Matousi dan Chakroun: 2008). Pengungkapan ini akan membuat *stakeholders* mendapatkan

semua informasi yang mereka butuhkan dan sebagai alat *monitoring* kinerja manajemen, serta berfungsi untuk menurunkan atau menekan biaya keagenan (*agency cost*) yang dikeluarkan oleh *stakeholders*.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, dan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa pemegang saham akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan. Selain itu, pemegang saham atau pemilik perusahaan dapat yakin bahwa agen tidak akan melakukan kecurangan yang akan mensejahterakan pihak agen dan *corporate governance* dapat meminimalkan biaya keagenan yang dikeluarkan pemegang saham (Mulia, 2009). *Corporate governance* dianggap mampu untuk mengurangi masalah keagenan dengan pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer, asimetri informasi, dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk kepentingan mereka sendiri akan dapat dikurangi dan dapat mengarah pada peningkatan pengungkapan perusahaan (Ho dan Wong, 2001 dalam Akhtarudin *et al.*, 2009).

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.1.2.1 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka,

komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Sedangkan menurut ISO 26000, CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mementingkan laba saja, melainkan harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan yang diakibatkan aktivitas operasional.

Definisi *Corporate Sosial Responsibility* di Indonesia disepadankan dengan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TSL) dalam UU PT No. 40 tahun 2007 yaitu komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Gray et, al. (1987) dalam Murwaningsari (2009) ruang lingkup tanggung jawab sosial (CSR) antara lain: (a) *Basic Responsibility*, tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan. Contohnya kewajiban membayar pajak, mentaati hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham (b) *Organizational Responsibility*, tanggung jawab perusahaan untuk

memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu karyawan, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat. (c) *Societal Responsibility*, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial sebenarnya untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan, karena dengan adanya aktivitas pertanggungjawaban perusahaan turut berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu dalam menjaga lingkungan. Selain itu, perusahaan dapat diterima kehadirannya dengan baik di lingkungan sekitar perusahaan (Terzaghi, 2012).

Dari manfaat tersebut maka tanggung jawab sosial perlu diungkap oleh perusahaan agar informasi mengenai kegiatan pertanggungjawaban mengenai sosial dan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan lebih transparan di masyarakat maupun *stakeholders*.

2.1.2.2 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility Disclosure*)

Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray *et, al.*, 1987 dalam **Murwaningsari, 2009**). Dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan membangun kepercayaan masyarakat bahwa segala aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan tidak

hanya mengutamakan keuntungan semata melainkan juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan dari aktivitasnya.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan bagian dari akuntansi pertanggungjawaban sosial yang mengkomunikasikan informasi sosial kepada *stakeholders* (Cheng dan Christiawan, 2011). Akuntansi pertanggungjawaban dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya (Guthrie dan Parker, 1990 dalam Sayekti dan Ludovicus, 2007).

Di Indonesia praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di atur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Paragraf 9, yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Pengungkapan tanggung jawab sosial ini juga terdapat dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-38/PM/1996 peraturan No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Peraturan ini berisi mengenai kebebasan bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan umum mengenai perusahaan, selama hal tersebut tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang disajikan dalam bagian lainnya. Penjelasan umum tersebut dapat berisi uraian mengenai keterlibatan perusahaan dalam kegiatan pelayanan masyarakat, program

kemasyarakatan, amal, atau bakti sosial lainnya serta uraian mengenai program perusahaan dalam rangka pengembangan SDM.

Kegiatan tanggung jawab sosial yang dulunya bersifat sukarela yaitu tanpa paksaan. Berubah menjadi wajib (*mandatory*) bagi perusahaan yang memiliki kriteria seperti disebutkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 menyatakan bahwa: Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Jika perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan tidak hanya wajib melakukan kegiatan pertanggungjawaban sosial, dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas juga mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan. Walaupun pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia sudah wajib diungkap, namun item-item CSR yang diungkapkan oleh perusahaan merupakan informasi yang masih bersifat sukarela (*voluntary*).

Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dilakukan dengan mengungkapkannya ke dalam laporan tahunan perusahaan atau dengan mengungkapkannya dalam laporan yang terpisah dari laporan tahunan. Di

Indonesia, perusahaan-perusahaan lebih umum mengungkapkan tanggung jawab sosial ke dalam laporan tahunan.

Saat ini pelaporan perusahaan berkembang mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berdiri sendiri dan terpisah dari laporan tahunan perusahaan, yang dikenal dengan *Sustainability Report* (Darwin, 2004). Menurut Elkington (1997) dalam Mulia (2009), salah satu model awal bagi perusahaan dalam menyusun *sustainability report* adalah dengan menggunakan konsep *triple bottom line*. Konsep *triple bottom line* memperhatikan tiga aspek, yaitu *economic prosperity*, *enviromental quality*, dan *social justice*. Berdasarkan ketiga konsep ini, perusahaan yang ingin terus berkelanjutan harus melihat dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang timbul dari operasi perusahaan.

Menurut Witolear (2005) dalam Mulia (2009) ada beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*, antara lain: (1) Meningkatkan Citra Perusahaan, (2) Disukai Konsumen, (3) Diminati oleh Investor, dan (4) Dipahami oleh *Stakeholder*.

Sekarang ini, *sustainability report* perusahaan-perusahaan hampir di seluruh dunia menggunakan standar pelaporan yang digagas oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). Konsep pelaporan *corporate social responsibility* yang digagas oleh GRI muncul sebab akibat dari adanya konsep *sustainability development*. *Sustainability reporting* dalam standar pelaporan GRI memperhatikan tiga aspek atau indikator, yaitu indikator kinerja ekonomi (*economic performance indicators*), indikator kinerja lingkungan (*environment performance indicators*), dan indikator sosial (*social performance indicatorcs*).

2.1.3 *Corporate Governance*

2.1.3.1 Definisi *Corporate Governance*

IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governace*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Di samping itu *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah “untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Penerapan praktik *Good Corporate Governance* diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, *Corporate Governance* adalah:

“Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Organ yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi, sedangkan *stakeholder* adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung. *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai struktur karena GCG berperan dalam menetapkan distribusi hak dan kewajiban antara berbagai kepentingan di dalam perusahaan antara dewan komisaris, dewan direksi, manajer perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya demi terciptanya keseimbangan kewenangan. Sementara GCG sebagai sebuah proses

karena GCG memastikan bahwa ada transparansi dan akuntabilitas dari aktivitas perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dalam pengimplementasian *Good Corporate Governance* terdapat beberapa prinsip agar seluruh pihak di dalam organisasi dapat patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam *good corporate governance*, yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, termasuk tentang kegiatan CSR.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Ada empat manfaat penerapan *Corporate Governance* (FCGI, 2001), yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's values* dan dividen.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* yang mana di dalamnya menyebutkan salah satu tujuan dari pelaksanaan GCG yang dilakukan perusahaan adalah untuk mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa GCG memiliki keterikatan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.1.3.2 Struktur *Corporate Governance*

Struktur *corporate governance* seperti kepemilikan manajemen, komposisi dewan komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan (Rustiarini, 2010). Sedangkan struktur *corporate governance* yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu independensi dewan komisaris, independensi komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik. Berikut ini penjelasan singkat mengenai struktur *corporate governance* yang akan digunakan dalam penelitian ini:

2.1.3.2.1 Independensi Dewan Komisaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota dalam membuat keputusan tidak dapat berbuat sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Di dalam keanggotaan dewan komisaris terdapat komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berada dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih dengan transparan dan independen, memiliki kompetensi dan integritas yang memadai, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dalam melakukan fungsi sebagai komisaris. Komisaris independen itu sendiri menunjukkan proporsi

komisaris independen yang terdapat dalam susunan dewan komisaris. Menurut Said *et, al.* (2009) komisaris independen memainkan peran penting dalam meningkatkan *image* perusahaan dan bertindak memantau dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan dengan benar dikelola oleh manajemen.

2.1.3.2.2 Independensi Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Di Indonesia keberadaan komite audit merupakan sebuah kewajiban, diatur dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan KNKG (2006):

“Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk dan jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang memiliki dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit.”

Keanggotaan komite audit diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX 5

Tahun 2004, komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua anggota luar emiten atau perusahaan publik. Komisaris independen merupakan salah satu syarat agar komite audit menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini dikarenakan keberadaan komisaris independen dalam komite audit yang lebih besar dapat mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan peningkatan pengendalian internal yang akan menyebabkan kualitas pengungkapan yang lebih baik (Forker, 1992 dalam Said *et, al.*, 2009)

Di dalam komite audit terdapat komite audit independen. Komite independen menunjukkan proporsi komite audit independen dalam susunan komite audit.

2.1.3.2.3 Kepemilikan Manajerial

Salah satu struktur kepemilikan saham dalam perusahaan yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh direksi, komisaris, ataupun manajemen perusahaan . Sehingga dengan adanya kepemilikan manajerial maka salah satu upaya yang dapat digunakan agar pengelola dapat melaksanakan aktivitas perusahaan sesuai dengan dengan kepentingannya (Said et, al., 2009).

2.1.3.2.4 Kepemilikan Asing

Salah satu struktur kepemilikan saham dalam perusahaan yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan asing adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan asing dapat berupa kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing, baik perorangan maupun lembaga. Perusahaan dengan kepemilikan asing, utamanya melihat keuntungan legitimasi dari para *stakeholder*-nya (Mulia, 2009).

2.1.3.2.2 Kepemilikan Publik

Salah satu struktur kepemilikan saham dalam perusahaan yaitu kepemilikan publik . Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan

yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Perusahaan yang didominasi kepemilikan publik cenderung mengungkapkan informasi tambahan karena banyaknya pihak yang membutuhkan informasi secara rinci mengenai perusahaan dan banyaknya tekanan dari para investor untuk perusahaan dapat mewujudkan akuntabilitas dalam bentuk pengungkapan informasi (Khan et. al., 2012).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Said, *et. al.* (2009) melakukan penelitian mengenai karakteristik *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan di Malaysia. *Corporate governance* diukur dengan ukuran dewan, independensi dewan, peran ganda CEO, komite audit independen, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Peneliti menggunakan 150 sampel data dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2006. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya dua variabel yang berhubungan dengan luas pengungkapan CSR yaitu kepemilikan oleh pemerintah dan komite audit, dan variabel yang signifikan adalah kepemilikan saham oleh pemerintah.

Murwaningsari (2009) melakukan penelitian tentang hubungan *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibilities* dan *Corporate Financial*

Performance. Corporate governance diukur dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Penelitian ini menggunakan CEO *tenure* dan jenis industri sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian ini adalah 126 perusahaan yang terdaftar di PRPM BEI pada tahun 2006. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial dan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat membuktikan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Mulia (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap luas pengungkapan CSR. *Corporate governance* diukur dengan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, independensi komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan 86 sampel data perusahaan IDX pada tahun 2008. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya faktor kepemilikan pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan Dilling (2010) menguji apakah terdapat perbedaan antara perusahaan yang menerbitkan dan tidak menerbitkan *sustainability report*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sektor

industri, pertumbuhan jangka panjang, akses terhadap ekuitas dan hutang jangka panjang, *corporate governance*, kinerja keuangan, dan lokasi. Sampel data dalam penelitian ini adalah 124 perusahaan di Reuters (Reuters 2009), *Yahoo Finance* (Yahoo Finance 2009), dan pernyataan *proxy* pada tahun 2007. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi multivariat logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan sektor industri berhubungan positif dengan *sustainability disclosure*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Michelin dan Parbonetti (2010). Peneliti menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *sustainability disclosure*. Variabel independen dalam penelitian ini *corporate governance* diukur dengan proporsi direktur independen, proporsi anggota *community influential*, keberadaan CSR *committee*, dan dualitas CEO. Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu *size*, profitabilitas, *leverage*, *age*, *listing status*, *country of origin*, tipe industri. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan di Amerika dan Eropa yang tercatat dalam *Dow Jones Sustainability Index* (DJSI) dan *Dow Jones Global Index* (DJGI). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini *Multivariate Regression (Ordinared Least Square)*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa hanya ada dua faktor yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan *sustainability report*, yaitu *Community Influential* dan Dualitas CEO.

Khan *et. al.* (2012) melakukan penelitian mengenai *corporate governance* dan *corporate social responsibility*. Karakteristik *corporate governance* yang diteliti seperti kepemilikan manajerial, *public ownership*, kepemilikan asing

board independence, dualitas CEO, dan keberadaan komite audit. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas. Sampel data dalam penelitian ini terdiri dari 116 perusahaan yang terdaftar dalam *Dhaka Stock Exchange* (DSE) di Bangladesh periode tahun 2005-2009. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *public ownership*, kepemilikan asing, *board independence*, dan keberadaan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Objek Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Said <i>et. al.</i> (2009)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variabel independen: ukuran dewan, independensi dewan, dualitas CEO, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah ▪ Variabel dependen: pengungkapan CSR ▪ Variabel kontrol: ukuran perusahaan, dan profitabilitas 	<i>Annual report</i> perusahaan publik di Malaysia	Regresi Berganda	Komite audit dan kepemilikan saham oleh pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Objek Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
2.	Murwaningsari (2009)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variabel independen: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional ▪ Variabel dependen: kinerja perusahaan ▪ Variabel intervening: pengungkapan CSR ▪ Variabel Kontrol: CEO <i>tenure</i> dan jenis industri 	<i>Annual report</i> perusahaan di PRPM BEI	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan manajerial dan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan ▪ Kepemilikan manajerial dan institusional, mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR
3	Mulia (2009)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variabel independen: komisaris independen, independensi komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah ▪ Variabel dependen: pengungkapan CSR ▪ Variabel kontrol: ukuran perusahaan dan profitabilitas 	<i>Annual report</i> perusahaan di IDX	Regresi Berganda	Kepemilikan pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Objek Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
4.	Dilling (2010)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variabel independen: sektor industri, pertumbuhan jangka panjang, akses terhadap ekuitas dan hutang jangka panjang, <i>corporate governance</i>, kinerja keuangan, dan lokasi ▪ Variabel dependen: pengungkapan <i>sustainability report</i> 	<i>Annual report</i> dan <i>sustainability report</i> perusahaan di Eropa	<i>Multivariate logistic regression</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sektor industri berhubungan positif dengan <i>sustainability disclosure</i>, ▪ tidak ada hubungan antara variabel <i>corporate governance</i> dengan variabel <i>sustainability disclosure</i>.
5.	Michelon dan Parbonetti (2012)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variabel independen: <i>independent directors</i>, <i>duality CEO</i>, <i>community influential members</i>, dan <i>CSR committee</i> ▪ Variabel dependen: pengungkapan <i>sustainability report</i> ▪ Variabel kontrol: <i>size</i>, profitabilitas, <i>leverage</i>, <i>age</i>, <i>listing status</i>, <i>country of origin</i>, dan tipe industri 	<i>Annual report</i> dan <i>sustainability report</i> perusahaan di Amerika dan UK yang termasuk dalam <i>Dow Jones Sustainability Index</i> (DJSI) dan <i>Dow Jones Global Index</i> (DJGI)	<i>Multivariate regression (ordinary least square)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Community influential members</i> dan <i>duality CEO</i> yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Objek Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
6.	Khan <i>et al.</i> (2012)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Variabel independen: kepemilikan manajerial, <i>public ownership</i>, kepemilikan asing <i>board independence</i>, dualitas CEO, dan keberadaan komite audit' ▪ Variabel dependen: pengungkapan CSR ▪ Variabel kontrol: ukuran perusahaan, umur perusahaan, <i>leverage</i>, dan provitabilitas 	<i>Annual report</i> perusahaan yang terdaftar di Bangladesh yang termasuk dalam <i>Dhaka Stock Exchange (DSE)</i>	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR ▪ <i>Public ownership</i>, kepemilikan asing <i>board independence</i>, dan keberadaan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR

2.3 Posisi Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara *corporate governance* dengan pengungkapan CSR pada perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Khan *et al.* (2009) yang menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Dengan sampel 116 perusahaan yang terdaftar dalam *Dhaka Stock Exchange (DSE)* di Bangladesh periode tahun 2005-2009, *corporate governance* yang diuji dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan asing, *board*

independence, dualitas CEO, dan keberadaan komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *public ownership*, kepemilikan asing, *board independence*, dan keberadaan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian Khan *et. al.* (2012) mengalami beberapa penambahan variabel dan pengurangan variabel. Beberapa pengurangan variabel antara lain variabel keberadaan komite audit karena varian variabel yang tidak bervariasi, dimana semua perusahaan yang menjadi sampel memiliki komite audit. Variabel *board independence* dan variabel dualitas CEO tidak digunakan karena disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, dimana perusahaan-perusahaan di Indonesia menganut *Two Tier Board System*. Selain pengurangan variabel, juga terdapat penambahan variabel meliputi independensi dewan komisaris dan independensi komite audit. Penelitian ini juga berbeda dalam sampel, di mana penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*. Serta, penelitian ini menggunakan item-item CSR yang mengacu pada standar pelaporan internasional “*Sustainability Reporting Guidelines*” versi 3.1 yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI).

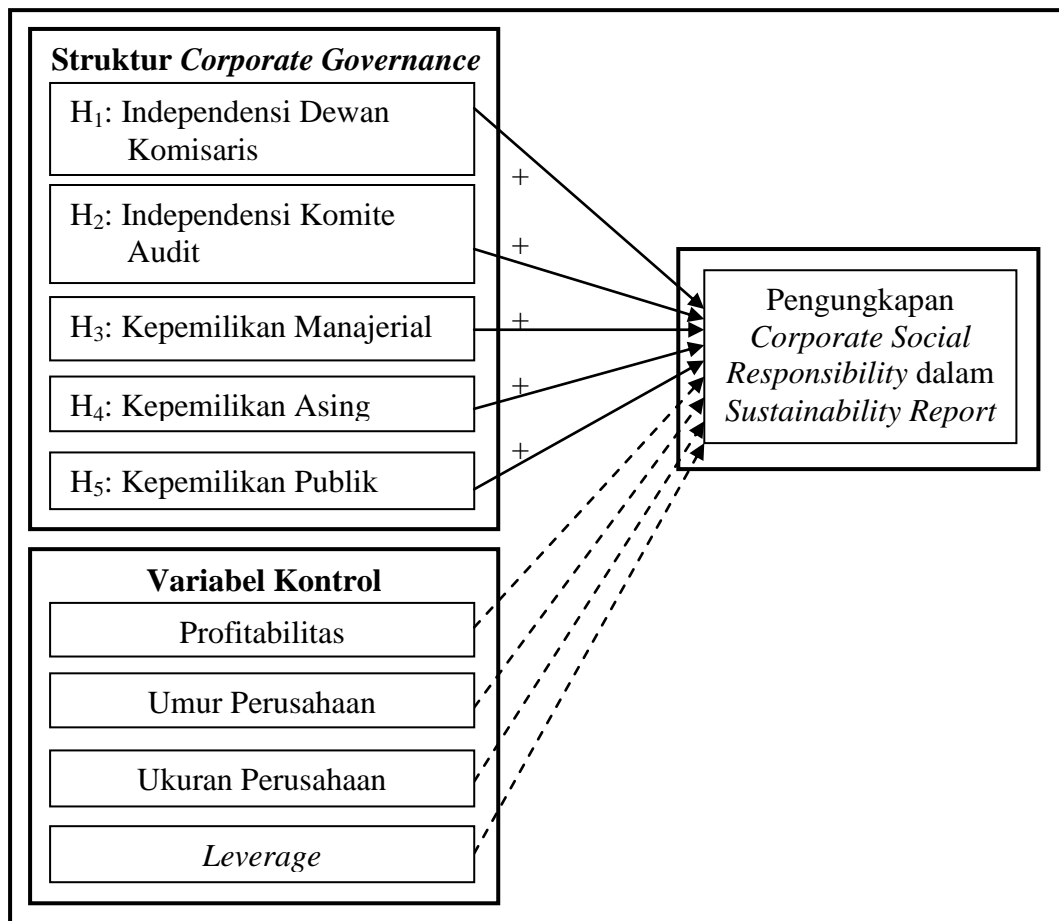
Penelitian ini masih didukung beberapa variabel kontrol yang sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, peneliti mengindikasikan faktor-faktor *corporate governance* yang digunakan antara lain independensi dewan komisaris, independensi komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik sebagai variabel independen penelitian serta profitabilitas diproksikan *return on asset*, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol perusahaan.

Untuk membantu dalam memahami struktur *Corporate Governance* yang mempengaruhi pengungkapan CSR diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas, disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut:

Gambar 2.4 Skema Kerangka Teoritis



Sumber: Model dikembangkan untuk penelitian, 2013

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Hubungan Independensi Dewan Komisaris dengan pengungkapan CSR

Berdasarkan teori *stakeholder*, dewan komisaris merupakan sebuah mekanisme akuntabilitas yang berperan dalam meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi kepentingan para *stakeholder*. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota

Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan komisaris independen telah diatur dalam ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004 dimana jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Keberadaan komisaris independen dapat mendorong Dewan Komisaris mengambil keputusan secara objektif yang melindungi seluruh pemangku kepentingan karena komisaris independen dapat bersikap netral dan objektif terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Dengan adanya dewan komisaris, pengawasan dapat berjalan lebih baik lagi terutama terhadap kegiatan agen yang menyimpang sehingga manajemen akan mengungkapkan semua informasi yang ada, termasuk informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian Mulia (2009) dan Khan *et, al.* (2012) menemukan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

2.5.2 Hubungan Independensi Komite Audit dengan Pengungkapan CSR

Untuk mendukung implementasi *Good Corporate Governance* maka dibuatlah organ tambahan dalam struktur perseroan yaitu komite audit. Komite

audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan terhadap manajemen (Surat Keputusan Ketua Bapepam KEP-29/PM/2004). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 121 menjelaskan bahwa Komite Audit beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang berasal dari Dewan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Dengan adanya independen dalam komite audit dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya agensi, meningkatkan pengendalian internal dan akan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Forker, 1992 dalam Said, et al., 2009). Karena anggota independen komite audit dapat bersikap netral terhadap manajemen, sehingga dapat bertindak secara objektif dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dan pada akhirnya dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan seluruh informasi perusahaan.

Penelitian Said *et, al.* (2009) menemukan independensi komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

2.5.3 Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Pengungkapan CSR

Kepemilikan manajemen adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer, dan dewan komisaris. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan dan juga menselaraskan kepentingan antara *stakeholders* dan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976).

Semakin besar kepemilikan manajer di dalam sebuah perusahaan, maka manajer akan mengurangi perilaku mementingkan kepentingan pribadi. Dengan begitu manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, yaitu salah satunya dengan mengungkapkan informasi CSR untuk meningkatkan *image* perusahaan meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktifitas tersebut (Gray, et al. (1988) dalam Anggraini (2006)).

Penelitian yang menunjukkan kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR di Indonesia antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

2.5.4 Hubungan Kepemilikan Asing dengan Pengungkapan CSR

Perusahaan multinasional dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi yang berasal dari para *stakeholder*-nya yang biasanya

berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) sehingga dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Resturini, 2010).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Sehingga perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas.

Penelitian Khan *et, al.* (2012) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis berikutnya yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

2.5.5 Hubungan Kepemilikan Publik dengan Pengungkapan CSR

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Perusahaan yang didominasi kepemilikan publik cenderung mengungkapkan informasi tambahan karena banyaknya pihak yang membutuhkan informasi secara rinci mengenai perusahaan dan banyaknya tekanan dari para investor untuk perusahaan dapat mewujudkan akuntabilitas dalam bentuk pengungkapan informasi.

Selain itu, perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata

masyarakat dalam memberikan imbalan (*deviden*) yang layak dan dianggap mampu beroperasi terus menerus (*going concern*) sehingga cenderung akan melakukan pengungkapan informasi sosial lebih luas (Badjuri, 2011).

Penelitian Khan *et, al.* (2012) menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis berikutnya yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₅: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu, variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel independen terdiri dari independensi dewan komisaris, independensi komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik.

Variabel dependen yang digunakan adalah luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah profitabilitas (*return on asset*), umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan *leverage*.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan *corporate social responsibility* pada *sustainability report* perusahaan atau *corporate social disclosure index* (CSDI). Metode analisis yang digunakan untuk mengukur luas pengungkapan CSR adalah metode analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* adalah suatu metode pengkodefikasian teks dari ciri-ciri yang sama untuk ditulis dalam berbagai kelompok (kategori) tergantung pada kriteria yang ditentukan (Sembiring 2005:383). Pengukuran luas pengungkapan CSR tersebut dilakukan dengan cara mengamati ada tidaknya suatu

item yang ditemukan dalam *sustainability report*, apabila *item* informasi tidak ada dalam *sustainability report* maka diberi skor 0, dan jika *item* informasi ditemukan dalam *sustainability report* maka diberi skor 1. Pada penelitian ini, item-item CSR menggunakan indikator yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) yang berjumlah 84 item, dimana GRI merupakan standar yang banyak digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia.

Luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum x_{ij}}{n} \quad (3.1)$$

Keterangan:

$CSRDI_j$ = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

$\sum x_{ij}$ = *dummy variable*, yaitu 1 jika item perusahaan diungkapkan, 0 jika item perusahaan tidak diungkapkan (jumlah item yang diungkapkan).

n = Jumlah item pengungkapan untuk perusahaan j, $n_j \leq 84$

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan

Yustivandana, 2006). Variabel independensi dewan komisaris diproksikan dengan proporsi komisaris independen. Proporsi komisaris independen diukur dengan rasio antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan.

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris perusahaan}} \quad (3.2)$$

3.1.2.2 Independensi Komite Audit

Komite audit independen adalah anggota yang ada di luar emiten atau perusahaan publik. Variabel independen ini diproksikan melalui proporsi komite audit independen. Proporsi komite audit independen diukur dari prosentase jumlah anggota komite audit independen dengan jumlah anggota komite audit, seperti dalam penelitian Said *et, al.* (2009).

$$\text{Proporsi Komite Audit Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah anggota komite audit perusahaan}} \quad (3.3)$$

3.1.2.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan pihak-pihak yang langsung berhubungan dalam pembuatan keputusan perusahaan) terhadap jumlah total saham yang beredar Said *et, al.* (2009).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \quad (3.4)$$

3.1.2.4 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing, baik perorangan maupun lembaga. Kepemilikan asing diukur dari persentase saham yang dimiliki oleh pihak asing dengan jumlah saham yang diterbitkan, seperti dalam penelitian Said *et, al.* (2009).

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \quad (3.5)$$

3.1.2.5 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan jumlah saham yang dimiliki publik atau masyarakat. Kepemilikan publik diukur dari persentase saham yang dimiliki oleh publik dengan jumlah saham yang diterbitkan (Khan *et, al.*, 2012)

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh publik}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \quad (3.6)$$

3.1.3 Variabel Kontrol

Penggunaan variabel kontrol dalam penelitian ini berfungsi sebagai pengontrol variabel independen untuk dapat menjelaskan keberadaan variabel dependen, serta untuk mengembangkan *baseline model* atau model dasar bagi pengungkapan *corporate social responsibility* sebagaimana yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dasar keputusan penggunaan variabel kontrol adalah untuk menghindari adanya unsur bias hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian dengan menggunakan variabel kontrol akan meminimalisasi bias

dibandingkan dengan penelitian tanpa menggunakan variabel kontrol. Variabel-variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

3.1.3.1 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan pengukuran dari keseluruhan efektifitas dan kinerja badan usaha yang pada akhirnya akan menunjukkan efisiensi dan produktivitas badan usaha (Sudana, 2011). Variabel profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA). ROA dipilih karena merupakan rasio profitabilitas yang dapat menggambarkan kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan.

$$\text{ROA (Return on Asset)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (3.7)$$

3.1.3.2 Umur Perusahaan

Umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan mampu bertahan dan mampu bersaing. Penelitian ini menggunakan ukuran umur perusahaan yang dihitung sejak tanggal perusahaan tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun perusahaan diteliti (Khan *et, al.*, 2012). Umur perusahaan ini dapat menggambarkan pengalaman perusahaan dalam mempublikasikan laporan.

$$\text{Umur perusahaan} = \text{LN (jumlah tahun sejak awal listed di BEI s.d perusahaan diteliti)} \quad (3.8)$$

3.1.3.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan total aset perusahaan pada neraca akhir tahun sebagai proksi untuk ukuran perusahaan. Total aset dipilih karena dapat menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN} (\text{Total Asset}) \quad (3.9)$$

3.1.3.4 Leverage

Leverage adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Dalam penelitian ini, *debt to total asset ratio* digunakan sebagai proksi untuk mengukur *leverage*. Rasio ini dipilih karena menggambarkan seberapa jauh dana disediakan oleh kreditur.

$$\text{Debt to total asset ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}} \quad (3.10)$$

3.2 Populasi Data dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2011. Lama periode dalam penelitian ini adalah 3 tahun karena untuk mendapatkan jumlah data yang cukup, dikarenakan perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* masih sedikit. Alasan lain karena data 3 tahun terakhir yang dapat mencerminkan keadaan perusahaan saat ini hingga 3 tahun terakhir sehingga dapat dibandingkan dari tahun ke tahun.

Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sampel harus merupakan sebagian dari populasi, sehingga sampel yang diambil adalah benar-benar dapat mewakili populasinya (Mustofa, 1998 dalam Hakim, 2006).

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang mempublikasikan *sustainability report* berturut-turut selama periode 2009-2011 dan dapat diakses melalui *website* perusahaan.
2. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) melalui situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan *website* perusahaan secara berturut-turut selama periode 2009-2011.
3. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data kuantitatif yang diukur dalam skala numerik. Terdapat beberapa alasan mengapa penulis menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengungkapan *corporate social responsibility* dipublikasikan lewat *sustainability report*.
2. Mudah dalam memperoleh data tersebut.
3. Data sekunder tidak memerlukan biaya yang terlalu besar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan dan *sustainability report* yang didapat dari *website* perusahaan atau dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data untuk variabel pengungkapan tanggung jawab sosial diperoleh dari *sustainability report* perusahaan. Sedangkan data untuk *corporate governance*, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan *leverage* diperoleh dari *annual report*.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi, dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan dan *sustainability report*. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data-data yang diperlukan, mencatat, dan menganalisis *sustainability report* dan *annual report* perusahaan tahun 2009-2011.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat pengungkapan *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemelencengan distribusi) (Ghozali, 2006).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2006). Berikut ini penjelasan uji asumsi klasik yang digunakan.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Menurut Ghozali (2006) ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara termudah untuk melihat normalitas residual yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan *ploting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Selain itu, pengujian analisis juga dapat dilakukan dengan uji statistik sederhana dengan melihat nilai kurtosis dan *skewness* dari residual. Uji statistik lain yang dapat

digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)

3.5.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan TOL, uji heteroskedastisitas menggunakan *scatterplot*, dan uji autokorelasi menggunakan *Durbin-Waston*. Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat hubungan antar sesama variabel-variabel independennya. Menurut Ghozali (2006), untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dilakukanlah uji multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam sebuah model regresi dapat dicermati dari hal-hal berikut (Ghozali, 2006):

1. Jika nilai *tolerance*-nya kurang dari 0,10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 maka terjadi multikolinieritas.
2. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas, dan sebaliknya jika nilai VIF di atas 10, maka terjadi multikolinieritas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Menurut Ghozali (2006) salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik *plot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Dasar analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis menggunakan grafik *plot* memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan yang mempengaruhi hasil *plotting*. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik *plot*. Oleh sebab itu, diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan adalah uji

glejser. Dalam uji *glejser*, apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut, diamati dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2006).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ pada persamaan regresi linear. Jika terjadi korelasi, maka dikatakan ada masalah autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin Watson*. Uji *Durbin Watson* ini digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai $dw < dl$, maka akan terjadi autokorelasi positif
2. Jika nilai $dw > (4-dl)$, maka akan terjadi autokorelasi negatif
3. Jika nilai $du < dw < (4-du)$ maka tidak akan terjadi autokorelasi

4. Jika $(4-du) \leq dw \leq (4-dl)$ atau $dl \leq dw \leq du$, maka pengujian tidak dapat disimpulkan.

Untuk menjamin keakuratan hasil bahwa tidak ada autokorelasi, penelitian ini juga menggunakan uji statistik lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan *run test*. *Run test* digunakan sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau *random* (Ghozali, 2006).

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Karena dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2006). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu independensi dewan komisaris, independensi komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik terhadap variabel dependen pengungkapan *corporate social responsibility*. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$CSRDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 IDK + \beta_2 IKA + \beta_3 KM + \beta_4 KA + \beta_5 KP + \beta_6 PROF + \beta_7 AGE + \beta_8 SIZE + \beta_9 LEV + \epsilon$$

Keterangan:

$CSRDI_{it}$ = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan i
pada tahun t

β_0 = *intecept*

β = koefisien regresi berganda

$\beta_1 IKD$ = Independensi Dewan Komisaris

$\beta_2 IKA$ = Independensi Komite Audit

$\beta_3 KM$ = Kepemilikan Manajerial

$\beta_4 KA$ = Kepemilikan Asing

$\beta_5 KP$ = Kepemilikan Publik

$\beta_6 PROF$ = Profitabilitas (*Return on Asset*)

$\beta_7 AGE$ = Umur Perusahaan

$\beta_8 SIZE$ = Ukuran Perusahaan (*ln Total Aset*)

$\beta_9 LEV$ = *Leverage (Debt to Total Asset Ratio)*

ϵ = *error term*

3.5.4. Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat

signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Koefisien (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Bila terdapat nilai *adjusted* R^2 bernilai negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol.